

ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2020-2023

KHARISMA ALMA PANCA DEWI*
KUSMAYADI
SUKO RAHARJO

Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Email: kharismaalma@gmail.com

Abstract: *This study aims to calculate revenue growth, assess effectiveness in realizing regional original income and the level of regional independence, measure the degree of regional decentralization and measure the level of harmony between operating expenditures and capital expenditures. The research methods used to collect data are interviews and documentation. The data analysis method used is horizontal and vertical analysis while the writing method used is description and exposition method. The results of calculating income growth have increased by an average of 7.89%, the effectiveness of Local Own Revenue shows performance with an average of 112%, the level of independence produces a figure of 18.37%, the degree of regional decentralization is 14.64% as well as the compatibility of Operational Expenditure/Direct Expenditure, which is equal to 77.60% and Capital Expenditure/Indirect Expenditure only spends with an average of 4 years of 16.81%.*

Keywords: *Revenue Growth, Local Financial Effectiveness, Independence, Decentralization, Spending Compatibility, Financial Performance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menghitung pertumbuhan pendapatan, menilai keefektifitasan dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian daerah, mengukur tingkat derajat desentralisasi daerah serta mengukur tingkat keserasian belanja operasi dan belanja modal. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis horizontal dan vertikal sedangkan metode penulisan yang digunakan adalah metode deskripsi dan eksposisi. Hasil perhitungan pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 7,89%, keefektifitasan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kinerja dengan rata-rata 112%, tingkat kemandirian menghasilkan angka sebesar 18,37%, tingkat derajat desentralisasi daerah sebesar 14,64% serta keserasian Belanja Operasi/Belanja Langsung, yaitu sebesar 77,60% dan Belanja Modal/Belanja Tidak Langsung hanya melakukan pengeluaran dengan rata-rata 4 tahun sebesar 16,81%.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Pendapatan, Efektivitas Pendapatan, Kemandirian, Desentralisasi, Keserasian Belanja, Kinerja Keuangan.*

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik di Indonesiaa terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan karena adanya pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Otonomi daerah didefinisikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 yang diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai wewenang dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Otonomi daerah adalah bentuk desentralisasi kebijakan pemerintahan yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat secara keseluruhan dengan menjamin bahwa setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk berkembang berdasarkan potensi yang ada, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pemerintahan daerah adalah sarana terdepan untuk memenuhi aspirasi masyarakat daerah, mendukung kebijakan nasional, dan beradaptasi dengan kecenderungan global. Akibatnya, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat menyelesaikan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien dan cepat, serta menangani berbagai masalah administrasi pemerintahan secara tepat (Guntoro Mohamad, 2021). Untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan sistem pembiayaan yang proporsional, adil, demokratis, transparan, dan efisien. Pemerintah daerah diberi otonomi untuk membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dan benar semakin penting. Untuk mengetahui seberapa baik dan benar pengelolaan ini, pengukuran kinerja keuangan diperlukan. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil produk, jasa, atau proses pelayanan publik. Pengukuran kinerja dilakukan untuk tiga tujuan. Pertama, untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Kedua, untuk membantu mengatur sumber daya dan proses pengambilan keputusan. Terakhir, meningkatkan pertanggungjawaban publik dan komunikasi kelembagaan. Analisis rasio keuangan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah adalah salah satu cara untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Rasio-rasio ini termasuk efektifitas, efisiensi, kemandirian, keserasian, dan pertumbuhan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah cara terbaik untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan ini karena LRA memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat umum, tentang bagaimana dana yang dikelola pemerintah daerah digunakan, dialokasikan, dan digunakan selama periode pelaporan. Realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pengukuran ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu (1) Analisis pertumbuhan pendapatan dan (2) Analisis Rasio Keuangan Daerah.

Analisis pertumbuhan pendapatan bertujuan untuk menggambarkan laju perubahan realisasi pendapatan dari tahun ke tahun, apakah mengalami kenaikan atau justru penurunan. Yang kedua yaitu analisis rasio keuangan, mencakup 3 analisis yaitu rasio efektivitas pendapatan, rasio kemandirian keuangan daerah, dan derajat desentralisasi. Ketiganya dilakukan untuk menganalisis keefektifitas penggunaan pendapatan oleh pemerintah daerah. Analisis kinerja belanja dilakukan melalui analisis keserasian belanja, yang dilakukan untuk melihat kecendrungan pemerintah daerah dalam pengeluaran belanja. Analisis ini diperlukan untuk menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya, lebih cenderung pada belanja modal atau operasi. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas Kabupaten Blora dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik dibelanjakan, namun juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) adalah badan yang mengelola urusan pemerintah daerah, khususnya pendapatan, pengelolaan terhadap keuangan dan asset daerah yang dimiliki Kabupaten Blora dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora memiliki tujuan yaitu Mewujudkan Institusi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Tertib, Transparan, Akuntabel dan Kredibel.

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Blora pada tahun 2020-2023.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pengertian Sektor Publik

Sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik dikenal sebagai akuntansi sektor publik. Di Indonesia, akuntansi sektor publik sebagai suatu cara akuntansi dan mekanisme analisis untuk penyelenggaraan dana publik di organisasi di pemerintah pusat, di lembaga tinggi negara dan departemen, di lembaga pelayanan publik, di organisasi pemerintah daerah, badan layanan publik yang berada di daerah, dan juga selain itu masyarakat, organisasi sosial dan lembaga sosial. Untuk mengelola berbagai fungsi pemerintah, seperti pengelolaan keuangan dan pelaporan, akuntansi sektor publik sangat penting. Laporan pengelolaan keuangan nantinya akan digunakan oleh lembaga publik untuk menyediakan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Pada dasarnya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu pengambilan keputusan. Organisasi dan lembaga publik selalu diminta untuk mengelola biaya sosial dan ekonomi dengan lebih efisien dalam melakukan tugas mereka. Akibatnya, akuntansi sektor publik ini digunakan untuk meminta pemerintah bertanggung jawab. Dengan kata lain, akuntansi sektor publik dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak publik dengan memberikan transparansi kepada publik.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, karakteristik akuntansi sektor publik meliputi keterbukaan, transparansi, akuntabilitas. Organisasi sektor publik bertanggung jawab atas pemangku kepentingan internal dan

masyarakat umum, yang bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik secara efektif. Selanjutnya, akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasikan, dan analisis yang menghasilkan laporan keuangan yang dalam suatu organisasi baik swasta maupun publik yang akan digunakan untuk memberikan informasi keuangan pada mereka yang membutuhkan untuk membuat suatu keputusan (Putri & Nevi, 2021).

Tujuan Organisasi Sektor Publik

Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah sebagai tempat bagi manajemen untuk memberikan informasi yang efektif, efisien, dan ekonomis kepada publik. Dengan memberikan informasi kepada publik, manajer dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara efektif dalam mengelola program dan penggunaan sumber daya sesuai dengan kewenangannya.

Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan akuntansi sektor publik harus konsisten. Laporan keuangan sektor publik dan akuntansi juga harus mengandung informasi yang dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal, dan yang dapat mendorong pengambilan keputusan dan evaluasi peristiwa masa lalu dan masa depan sehingga dapat dipertimbangkan bersama dengan laporan keuangan sebelumnya.

Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyampaikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, keuntungan operasi, dan perubahan ekuitas entitas pelaporan. Secara khusus, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan bahwa entitas pelaporan bertanggung jawab atas sumber daya yang diberikan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengatakan laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Saldo Anggaran Lebih awal
 - 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - 3) Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- c. Neraca menunjukkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Aset, kewajiban, dan ekuitas adalah unsur yang dicakup oleh neraca.
- d. Laporan Arus Kas menunjukkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode waktu tertentu. Laporan ini menunjukkan informasi tentang kas yang berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dalam aset non-keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran.
- e. Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
 - 2) Beban dari kegiatan operasional
 - 3) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada
 - 4) Pos luar biasa, bila ada
 - 5) Surplus/defisit-LO.
- f. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Catatan atas laporan keuangan memberikan semua

informasi kualitatif, menjelaskan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan serta penjelasan naratif atau rincian dari angka yang terlihat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ringkasan sumber daya ekonomi yang dimiliki, didistribusikan, dan digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama periode pelaporan.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan PAD adalah untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan kemampuan mereka sebagai bagian dari desentralisasi.

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Menurut UU no. 1 Tahun 2022 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karakteristik dari tiap pajak daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame.

b. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat diperhitungkan sebagai objek retribusi. Hanya jasa tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai objek retribusi menurut pertimbangan sosial ekonomi, seperti jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah adalah pendapatan dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berasal dari dana pembangunan daerah dan bagian dari anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Perusahaan milik daerah didirikan dan dikelola sesuai dengan alasan pendirian dan pengelolaan. Perubahan daerah adalah suatu perusahaan produksi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, menyediakan jasa, menyelenggarakan keuntungan umum, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2. Lain-lain PAD yang sah

Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3. Dana perimbangan

Diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam, dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, yang diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang diukur.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian hasil kerja pemerintah daerah, yang mencakup anggaran dan realisasi anggaran, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan selama

periode anggaran melalui kebijakan atau undang-undang. untuk mengetahui seberapa baik pemerintah daerah mengelola laporan keuangan. Pendapatan dan anggaran dapat dilihat dari analisis kinerja keuangan pendapatan daerah. Kinerja pemerintah daerah dievaluasi dengan baik ketika realisasi melebihi anggaran.

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis kinerja keuangan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut: Mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah untuk mengetahui kemampuan pendapatan dan sumber daya perekonomian, kondisi keuangan, seberapa baik pemerintah dapat memenuhi kewajibannya, dan memastikan bahwa anggaran telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta juga meningkatkan keberhasilannya yang dicapai di periode ke periode berikutnya. Adapun rumus dalam jurnal (Zuhri & Soleh., 2022):

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{RpXn - Xn}{RpXn} \times 100\% \quad (1)$$

2. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Adapun rumus dalam jurnal (Kusmayadi et al., 2024) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \quad (2)$$

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah Kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah ditunjukkan oleh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). Adapun rumus dalam jurnal (Kusmayadi et al., 2024). sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \quad (3)$$

c. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal adalah kemampuan dan kewenangan keuangan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri, mendistribusikan/mengelolanya, dan menggunakan untuk kegiatan pemerintahan. Adapun rumus dalam jurnal (Kusmayadi et al., 2024) sebagai berikut:

$$\text{RDDF} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \quad (4)$$

d. Rasio Kesenjangan Belanja

Prinsip keserasian menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dana untuk belanja operasi dan modal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi, semakin kecil persentase dana modal yang digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi masyarakat. Adapun rumus dalam jurnal (Kusmayadi et al., 2024). sebagai berikut:

$$\text{RK} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\% \quad (5)$$

1) Rasio Belanja Operasi

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total belanja operasi dan total belanja daerah, yang menunjukkan seberapa besar porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Adapun sumber rumus dalam jurnal (Zuhri & Soleh, 2022) sebagai berikut:

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \quad (6)$$

2) Rasio Belanja Modal

Rasio ini adalah perbandingan antara total belanja modal yang dilakukan dan total belanja daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun sumber rumus dalam jurnal (Zuhri & Soleh, 2022) sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \quad (7)$$

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019:2) metode penyusunan Tugas Akhir merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penyusunan Tugas Akhir yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini meliputi klasifikasi jenis data, metode pengumpulan data, dan metode penulisan data.

Klasifikasi Data

Jenis data menurut sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Menurut Bungin, pada buku (Rahmadi, 2011) data primer adalah data yang didefinisikan langsung diperoleh dari sumber data awal di tempat atau objek penyusunan Tugas Akhir. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak menggunakan data primer.

b. Data Sekunder

Menurut Bungin, pada buku (Rahmadi, 2011) data sekunder adalah Data yang diperoleh dari sumber sekunder atau sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPPKAD Kabupaten Blora Tahun 2020-2023.

Jenis Data Menurut Sifatnya

Jenis data menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2019:9) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/scoring. Data kuantitatif yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada BPPKAD Kabupaten Blora tahun 2020-2023.

b. Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2019:9) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data kualitatif yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini meliputi profil, visi dan misi, lokasi, kedudukan, tujuan dan sasaran, struktur organisasi, fungsi masing-masing bagian Tahun 2024.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini yaitu:

a. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019:314) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Blora tahun 2020-2023.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2019:304) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini wawancara dilakukan kepada bagian Akuntansi BPPKAD Kabupaten Blora. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yaitu mengenai penyebab penurunan dan kenaikan yang terjadi pada kinerja keuangan Kabupaten Blora.

Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan dalam Tugas Akhir adalah:

a. Analisis Horizontal (Dinamis)

Analisis Horizontal adalah metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun/periode, sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya.

b. Analisis Vertikal (Statis)

Analisis Vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun/periode tertentu, yaitu dengan membandingkan antar pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun (periode) yang sama.

Metode analisis data yang digunakan untuk menyusun Tugas Akhir ini adalah Analisis Horizontal yaitu membandingkan pos pendapatan dan Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran untuk beberapa periode yang berbeda yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 pada Laporan Realisasi Anggaran untuk beberapa periode yang berbeda yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Metode Penulisan

Metode Penulisan Data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

- a. Menurut Sugiyono (2019:206) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Metode deskripsi dalam Tugas Akhir ini digunakan dalam menjelaskan mengenai gambaran umum BPPKAD Kabupaten Blora 2024.

- b. Menurut Bahtiar dan Fatimah (2014) menjelaskan bahwa paragraf metode eksposisi merupakan paragraf paparan yang bertujuan untuk menampilkan atau memaparkan sosok objek tertentu yang hendak dituliskan. Dalam penulisan Tugas Akhir ini metode eksposisi digunakan untuk menjelaskan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Tahun 2020-2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat BPPKAD Kabupaten Blora

Pembentukan BPPKAD Kabupaten Blora didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Blora. Merupakan unsur pelaksana serta unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora terletak di Jl. Gatot Subroto No.111, Kajangansawan, Sonorejo, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58213.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2) Melaksanakan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora

Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangannya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Jika positif maka kinerja keuangan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya.

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 1. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Blora 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Pendapatan Asli Daerah	21,40%	9,04%	-0,25%	10,28%	10,12%
Pendapatan Transfer	-10,14%	23,75%	2,01%	23,90%	9,88%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-0,13%	-76,27%	-100,00%	0,00%	-44,10%
Total Pendapatan Daerah	-5,04%	4,66%	-2,25%	11,15%	2,18%
Kriteria	Negatif	Positif	Negatif	Positif	

Sumber: (Pengolahan Data)

Secara keseluruhan, kinerja pendapatan Kabupaten Blora dari tahun 2020-2023 dapat dikatakan baik karena mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata sebesar 2,18%. Hasil perhitungan ini telah dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak bidang akuntansi BPPKAD Kabupaten Blora.

Perhitungan Rasio Efektivitas

Tabel 2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora 2020-2023

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2020	299.687.660.301	277.463.428.182	108,01%	Sangat Efektif
2021	326.770.477.077	262.245.392.980	124,60%	Sangat Efektif
2022	325.966.473.177	314.441.617.697	103,67%	Sangat Efektif
2023	359.488.807.356	326.554.386.000	110,09%	Sangat Efektif
	Rata-rata		112%	

Sumber: (Pengolahan Data)

Rasio Efektivitas keuangan Kabupaten Blora selama tahun 2020-2023 menunjukkan kinerja yang sangat efektif dengan rata-rata 112%. Hal ini dikarenakan penerimaan sektor pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pos Lain-lain PAD yang Sah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Blora dapat dinilai memiliki kinerja yang sangat efektif meskipun pada tahun 2020- 2023 tidak dapat merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sesuai yang dianggarkan. Hasil perhitungan ini telah dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak bidang akuntansi BPPKAD Kabupaten Blora.

Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Blora 2020-2023

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio (%)	Pola Hubungan
2020	299.687.660.301	1.466.178.491.234	20,44%	Instruktif
2021	326.770.477.077	1.814.362.388.710	18,01%	Instruktif
2022	325.966.473.177	1.850.883.832.469	17,61%	Instruktif
2023	359.488.807.356	2.064.491.342.928	17,41%	Instruktif
	Rata-rata		18,37%	

Sumber: (Pengolahan Data)

Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Blora selama tahun 2020-2023 menunjukkan pola hubungan instruktif dengan rata-rata 18,37%. Kabupaten Blora dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap dana pihak ekstern masih sangat tinggi dan dibuktikan dengan adanya realisasi dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan bagi hasil lainnya yang meningkat. Hasil perhitungan ini telah dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak bidang akuntansi BPPKAD Kabupaten Blora.

Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 4. Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Blora 2020-2023

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Penilaian
2020	299.687.660.301	2.127.946.961.535	14,08%	Rendah
2021	326.770.477.077	2.227.065.270.461	14,67%	Rendah
2022	325.966.473.177	2.176.850.305.646	14,97%	Rendah
2023	359.488.807.356	2.423.980.150.284	14,83%	Rendah
	Rata-rata		14,64%	

Sumber: (Pengolahan Data)

Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Blora selama tahun 2020-2023 tergolong rendah dengan rata-rata 14,64%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi atau kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Blora untuk melaksanakan pembangunan dinilai rendah. Ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah memiliki kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blora masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan

daerah. Ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blora dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masih tergolong sangat kurang. Hasil perhitungan ini telah dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak bidang akuntansi BPPKAD Kabupaten Blora.

Perhitungan Rasio Keserasian

a. Rasio Biaya Operasi

Tabel 5. Analisis Belanja Operasi Pada Total Belanja Kabupaten Blora 2020-2023

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	(%)	Kriteria Penilaian
2020	1.698.646.936.764,00	2.109.122.887.754	80,54%	Baik
2021	1.806.323.713.047,00	2.113.773.065.809	85,45%	Baik
2022	1.880.996.164.837,98	2.396.215.621.703	78,50%	Baik
2023	1.552.187.476.935,00	2.355.513.384.429	65,90%	Baik
	Rata-rata		77,60%	

Sumber: (Pengolahan Data)

Rasio Belanja Operasi Kabupaten Blora tahun 2020-2023 tergolong baik dengan rata-rata 77,60%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Kabupaten Blora masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Besarnya alokasi dana belanja operasi terutama dikarenakan belanja pegawai untuk gaji PNS. Hasil perhitungan ini telah dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak bidang akuntansi BPPKAD Kabupaten Blora.

b. Rasio Belanja Modal

Table 6. Analisis Belanja Modal Pada Total Belanja Kabupaten Blora 2020-2023

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	(%)	Kriteria Penilaian
2020	349.064.685.820,00	2.109.122.887.754	16,55%	Tidak Baik
2021	298.444.143.812,00	2.113.773.065.809	14,12%	Tidak Baik
2022	507.666.732.865,02	2.396.215.621.703	21,19%	Tidak Baik
2023	362.495.787.332,00	2.355.513.384.429	15,39%	Tidak Baik
	Rata-rata		16,81%	

Sumber: (Pengolahan Data)

Rasio Belanja Modal Kabupaten Blora selama tahun 2020-2023 tergolong tidak baik dengan rata-rata presentase sebesar 16,81%. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Blora kecil atau belum terpenuhi. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hasil perhitungan ini telah dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak bidang akuntansi BPPKAD Kabupaten Blora.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis kinerja keuangan Kabupaten Blora tahun 2020-2023, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Blora memperoleh hasil yang positif, yaitu penerimaan pendapatan mengalami kenaikan dengan rata-rata presentase 4 tahun sebesar 2,18%; (2) Efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Blora selama tahun 2020-2023 menunjukkan kinerja yang sangat efektif dengan rata-rata 112%; (3) Tingkat kemandirian daerah menghasilkan angka yang rendah sebesar 18,37% dengan pola hubungan instruktif yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah karena Kabupaten Blora tidak mampu menunjukkan kemandirian dalam melaksanakan otonomi daerah; (4) Tingkat derajat desentralisasi daerah untuk melaksanakan pembangunan daerahnya dinilai rendah yaitu sebesar 14,64%; (5) Keserasian belanja operasi, yaitu sebesar 77,60% dengan kriteria penilaian baik dan

untuk Belanja modal Kabupaten Blora melakukan pengeluaran dengan rata-rata 4 tahun sebesar 16,81% dengan kriteria penilaian tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Blora dinilai cukup baik dalam merealisasikan anggaran belanja daerahnya sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, Ahmad dan Fatimah. 2017. Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Bogor: In Media.
- Elsye Rosmery. 2017. Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Cendekia Jaya. Vol. 3. No. 2
- Kusmayadi et al., 2024. Analysis Of Financial Performance Measurement In Semarang City Government. Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science. Volume 04 Issue 01.
- P3. 2020. Buku Pedoman dan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Penyusunan Tugas Akhir. Semarang: Politeknik Negeri Semarang.
- Peraturan Bupati Blora No. 63 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora